

## **Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Di Kota Mojokerto**

**Anisa Pusparani**

13040674085 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) anisa.pusparani13@gmail.com

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si**

0029077404 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) prabawatiindah@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Program PUSYAR merupakan program pembiayaan kepada pelaku UKM dan IKM di Kota Mojokerto dengan basis syariah yang berlandaskan Perda Nomor 03 pasal 20 ayat 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan MoU kerjasama PUSYAR. Tujuan dari program PUSYAR adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi UKM dan IKM di Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Evaluasi Program Pembiayaan Syariah (PUSYAR) Di Kota Mojokerto.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama context evaluation, program PUSYAR telah mencapai tujuan dan kelompok sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun ada kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu keterbatasan dana dari Baznas Kota Mojokerto sebagai biaya margin, asuransi, dan administrasi. Kedua, input evaluation, semua indikator telah terpenuhi serta mampu mendukung keberhasilan PUSYAR termasuk alternatif dan strategi yang diterapkan. Namun mekanisme pengajuan pinjaman membutuhkan waktu yang lama. Salah satunya disebabkan tidak adanya standar waktu yang ditetapkan. Ketiga adalah process evaluation, dapat diketahui bahwa dari keempat pihak pelaksana dalam program PUSYAR, pihak MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) kurang maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Keempat adalah product evaluation, program PUSYAR ini telah mampu membawa manfaat dan dampak positif bagi kelompok sasaran yaitu memberikan pinjaman pembiayaan tanpa bunga dan biaya tambahan serta mengembangkan usaha yang dimiliki UKM dan IKM selaku peserta PUSYAR baik menambah produksi maupun menambah usaha baru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi program PUSYAR di Kota Mojokerto menemukan beberapa permasalahan dan kendala. Maka saran dari peneliti adalah mempersingkat waktu dalam mekanisme pengajuan pinjaman melalui adanya standart minimal dan maksimal waktu pelayanan, meningkatkan peran MES dalam membina dan mengawasi peserta PUSYAR sehingga dapat membawa manfaat dan dampak secara optimal, melaksanakan program PUSYAR secara berkelanjutan dan memunculkan inovasi pengembangan program PUSYAR.

**Kata Kunci** : Evaluasi, Program PUSYAR, Kesejahteraan UKM

### **Abstrak**

PUSYAR or Program Pembiayaan Syariah (Sharia Financing Program) is a program of financing to SME (Small Medium Enterprise) and SMI (Small Medium Industry) in Mojokerto City on the basis of Sharia based on Local Law Regulation No. 03 of Article 20, paragraph 3 in 2010 about the management of zakat, donation, and alms which then applied with PUSYAR MoU cooperation. The purpose of PUSYAR program is to provide benefits and prosperities for SME and SMI in Mojokerto. This research aims to describe and illustrate PUSYAR Evaluation in Mojokerto.

The method used in this research is a descriptive with qualitative approach. The research data were collected by using three procedure, those are observation, interview, and documentation. The data analysis was applied with techniques of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this research indicate PUSYAR program evaluation in Mojokerto through CIPP evaluation method according to Stufflebeam. The first one is context evaluation. PUSYAR program has achieved its purposes and target groups according to which has been decided. However, there is a need which has not been achieved yet, that is the limited funds from Baznas Mojokerto as cost margins, insurance, and administration. Second is input evaluation. All the indicators have been completed and able to support the successful of PUSYAR including alternatives and strategies implemented. However, the mechanism of loan applications takes a long time. One of them is because there is no time standardization decided. The third is evaluation process. It can be seen that from the four-party implementers in PUSYAR program, the MES or Masyarakat Ekonomi Syariah (Sharia Economic

Society) is not good enough in running the tasks and responsibilities. Fourth is the product evaluation. This PUSYAR program has been able to bring the benefits and positive impacts on the target groups, such as providing financial loan without interest and additional cost as well as developing businesses owned by SME and SMI as participants of PUSYAR, either increasing the production or adding new enterprise.

So it can be concluded that the PUSYAR program evaluation in Mojokerto still found several problems and obstacles. Then the research suggests shortening the time in the mechanism of loan applications through the standard of minimum and maximum service time, increasing the role of MES in fostering and overseeing PUSYAR participants so as to bring benefits and impacts optimally, implementing the PUSYAR program sustainably, and bringing the innovation of PUSYAR program development.

**Keywords:** Evaluation, PUSYAR Program, Prosperity for SME

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Negara berkembang, seperti halnya yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh Negara Indonesia bisa ditemui hampir diseluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kemiskinan yang ada di Indonesia menunjukkan angka yang bisa dibilang cukup tinggi. Pernyataan tersebut didukung berdasarkan data jumlah penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September tahun 2014 mencapai 27,73 juta orang (10,96 persen) dan pada bulan Maret 2015 telah mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen). Berdasarkan data tersebut, maka dapat di lihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan. (<https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158>)

Kemiskinan sendiri terbagi atas 3 jenis yaitu kemiskinan *relative*, kemiskinan *absolut*, serta kemiskinan *structural* dan *cultural*. Kemiskinan *relative* merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara *absolut* ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan *structural* dan *cultural* merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Hamdani,2009 : 43). Berdasarkan 3 jenis kemiskinan tersebut, kemiskinan *relative* dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab masalah kemiskinan di Indonesia yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di berbagai wilayah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun

sumberdaya finansial untuk dapat memakmurkan masyarakatnya.

Pemerataan pendapatan telah diupayakan dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui perpajakan yaitu pajak penghasilan. Dimana semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Sistem perpajakan ini dapat dijadikan sebagai salah satu usaha dalam pendistribusian pendapatan nasional. Melalui usaha yang dilakukan pemerintah tersebut pembangunan ekonomi diharapkan dapat lebih baik (Nafik,2009 : 45). Sayangnya yang menjadi kendala adalah dengan adanya pajak pun masih belum mampu mengatasi ketimpangan pendapatan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dana hasil pemungutan pajak tersebut belum mengenai langsung pada permasalahan inti dalam pengentasan kemiskinan. Ditambah lagi dengan keberadaan penduduk miskin yang mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh terhadap peluang kerja baru yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Penentuan alat atau instrument dalam pemerataan pendapatan juga akan sangat berpengaruh agar kebijakan dapat tepat sasaran dan mengalami perubahan yang signifikan dalam mengangkat taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Banyak usaha produktif yang telah dilakukan oleh pemerintah demi mengatasi pemerataan distribusi pendapatan, namun dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal. Salah satunya seperti usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan pinjaman dari bank milik pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi.

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi

daerah membuat UMKM lebih diperhatikan oleh pemerintah daerahnya. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama untuk menjadi otonomi adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Menurut pendapat Syafrudin (1991:41) otonomi merupakan jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan pemerintah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ini berarti perlu ada kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang mampu memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Jadi peran UMKM di daerah tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah (Putra dan Saskara, 2013)

Apabila berbicara mengenai pinjam meminjam, masyarakat sering merasa terbebani dalam hal prasyarat yang diberikan oleh bank maupun lembaga penyalur kredit lainnya. Selain itu, bunga yang diberikan juga terbilang cukup besar dan dirasa memberatkan masyarakat yang mengajukan pinjaman. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih inovatif dalam merencanakan dan menerapkan program terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan misalnya dengan menerapkan prinsip peminjaman kepada masyarakat tanpa bunga yang diharapkan akan sangat membantu masyarakat. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Mojokerto dengan mengeluarkan inovasi program yaitu berupa Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR).

Program PUSYAR sendiri merupakan kegiatan pembiayaan secara syariah kepada pelaku UMKM. Pelaksanaan PUSYAR melibatkan empat instansi yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto sebagai pihak yang menyalurkan pembiayaan dengan sistem akad murobahah yang beban biaya margin, asuransi, dan administrasinya ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan pemanfaatan dana infaq dan sedekah, proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto serta pembinaan manajemen usaha dan keuangannya dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto.

PUSYAR adalah salah satu program milik Baznas Kota Mojokerto yang memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi UKM dan IKM di Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan karena Kota Mojokerto memiliki banyak pelaku UMKM, namun sayangnya para pelaku UMKM kurang memiliki cukup dana untuk memajukan usaha mereka masing-masing.

Itulah sebabnya, Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Mas'ud Yunus menggagas program PUSYAR untuk membantu permodalan dalam meningkatkan UMKM di kota Mojokerto. Program ini diharapkan dapat meringankan beban para pelaku UMKM dalam mendapatkan dana pinjaman untuk peningkatan usaha yang mereka miliki serta akan berimbas pada peningkatan perekonomian dan peningkatan PAD Kota Mojokerto (Sumber : Jawapos.com)

Pelaksana dalam program PUSYAR disebut sebagai empat pilar memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan MoU yang telah disepakati. Namun sayangnya dalam pelaksanaan program PUSYAR masih ada pihak yang belum menjalankan tugasnya secara maksimal yaitu pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada peserta PUSYAR. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh peserta PUSYAR, banyak dari mereka yang justru kurang mengetahui peran dari pihak MES.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feny Indrasari tentang "Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mojokerto" menyebutkan bahwa implementasi Program PUSYAR sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan yaitu berdasarkan variable yang dapat mempengaruhi kebijakan menurut Merille S. Grindle. Namun, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ada indikator yang tidak terlaksana cukup baik yaitu indikator "*Site of Decision Making*". Berdasarkan indikator tersebut, hasil penelitian menyebutkan bahwa mekanisme pengajuan cukup rumit, sehingga membuat proses perizinan cukup lama (Indrasari, 2016:69).

Evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan guna mengetahui apakah suatu kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan atau belum dalam suatu kebijakan, serta apakah suatu kebijakan tersebut membawa dampak dan manfaat bagi kelompok sasaran. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Evaluasi Program Pembiayaan Syari'ah (PUSYAR) di Kota Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan nyata terkait Evaluasi program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

Penelitian ini akan dikaji menggunakan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam yang terdiri dari *context, input, process, product* sebagai berikut:

a. *Context evaluation to serve planning decision*

Evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan. Seorang evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil program.

b. *Input Evaluation structuring decision*

Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.

c. *Process evaluation to serve implementing decision*

Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki. Evaluasi process menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staf melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan membuat penafsiran hasilnya.

d. *Product evaluation to serve recycling decision*

Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan? Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut? Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi secara seksama. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dan bukti pertanggung jawaban (*accountability*) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (*delineating*), perolehan atau temuan (*obtaining*), dan menyediakan (*providing*) bagi para pembuat keputusan.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Mojokerto. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2010 : 219) teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalkan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Subjek penelitian dalam penelitian ini diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tentang Evaluasi Program PUSYAR di Kota Mojokerto, yaitu:

1. Bapak Ma'shum Maulani selaku Kepala Kantor Baznas Kota Mojokerto
2. Bapak Nur Khanan selaku Bagian Administrasi, Sumberdaya Manusia, Umum
3. Diskoperindag Kota Mojokerto
4. Bapak Razel selaku Bagian Administrasi PUSYAR dari PT. BPRS Kota Mojokerto
5. Ibu Rindha dari BPRS Kota Mojokerto
6. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
7. Pemilik UMKM selaku peserta PUSYAR

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan pada staff dari empat instansi penyelenggara program PUSYAR yaitu Baznas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto. Selain itu, data primer juga akan diperoleh melalui wawancara dengan pemilik UMKM selaku peserta program PUSYAR di Kota Mojokerto.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berupa dokumen, artikel serta gambar/foto. Data sekunder ini juga dapat digali melalui media online dimana berbagai macam informasi dapat diperoleh yaitu terkait PUSYAR di Kota Mojokerto. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari penelitian atau skripsi yang terkait sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Letak Geografi dan Demografi Kota Mojokerto

Kota Mojokerto mempunyai luas wilayah 16,46 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari yang keseluruhannya mencakup 18 kelurahan. Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22meter di atas permukaan laut.

Ditinjau dari aspek demografi, jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun 2015 adalah sebanyak 135.204 jiwa yang tersebar pada dua kecamatan dan 18 kelurahan. Penduduk perempuan sebanyak 68.206 jiwa atau sebesar 50,51% dan penduduk laki-laki sebanyak 66.818 jiwa atau sebesar 49,49%.

### 2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Baznas Kota Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggungjawab secara langsung kepala Dewan Pembina. Kepala Kantor membawahi Bagian Tata Usaha, selain itu kepala kantor juga membawahi Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan serta Bidang Administrasi, SDM, dan Umum.

### 3. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

PUSYAR merupakan singkatan dari Pembiayaan Usaha Syariah yang berarti memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku UKM dan IKM di Kota Mojokerto secara syariah. Program PUSYAR tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam karena biaya margin, administrasi dan asuransi ditanggung oleh pihak Baznas Kota Mojokerto yang diambil dari pengelolaan dana infaq dan sedekah. Tujuan dari program PUSYAR adalah membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi UKM dan IKM di Kota Mojokerto.

Baznas Kota Mojokerto bekerjasama dengan tiga instansi lain dalam pelaksanaan program PUSYAR yang disebut empat pilar yaitu Diskoperindag Kota Mojokerto, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto. Program PUSYAR berlandaskan Perda Nomor 03 pasal 20 ayat 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah yang kemudian diaplikasikan kedalam MoU kerjasama PUSYAR

yang ditandatangani secara bersama pada Selasa 9 April 2013.

Program PUSYAR ini memberikan pinjaman mulai dari Rp 750.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- yang masing masing terbagi menjadi dua jenis yaitu PUSYAR Jilid 1 dengan pinjaman maksimal Rp 10.000.000,- dan PUSYAR Jilid 2 dengan pinjaman maksimal Rp 50.000.000,-. Pengembalian pinjaman bergantung pada jenis PUSYAR yaitu PUSYAR Jilid satu dengan waktu pengembalian 18bulan dan PUSYAR Jilid 2 dengan waktu pengembalian 24bulan.

### 4. Evaluasi Program PUSYAR di Kota Mojokerto

Evaluasi Program Pembiayaan Usaa Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto akan dikaji menggunakan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam yang terdiri dari *context, input, process, product*. Pemaparan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto sebagai berikut:

#### a. *Context*

Dilihat dari indikator *context*, latar belakang program PUSYAR adalah banyaknya masyarakat khususnya pemilik UMKM yang terbelit hutang pada bank perseorangan atau yang biasa disebut bank titil dengan bunga tinggi. Semakin lama, pinjaman tersebut semakin membelit usaha mereka. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka tujuan dari program PUSYAR adalah memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi UKM dan IKM di Kota Mojokerto. Melalui pinjaman tanpa bunga dan biaya tambahan yang disalurkan program PUSYAR ini dapat membantu perekonomian masyarakat Kota Mojokerto melalui kemandirian dari UMKM, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Melihat tujuan yang telah tercapai, program PUSYAR juga telah mencapai kelompok sasaran yaitu UMKM yang terdiri dari UKM dan IKM di Kota Mojokerto yang telah menjadi peserta PUSYAR baik Jilid 1 maupun Jilid 2. Namun sayangnya, ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan PUSYAR yaitu terbatasnya sumberdaya finansial yang dimiliki oleh Baznas sebagai biaya margin, asuransi, dan administrasi. Keterbatasan ini menyebabkan, tidak cukup banyak UKM dan IKM yang dapat mengajukan pinjaman disetiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan PUSYAR Jilid 2 yang hanya terlaksana ditahun 2015 dan tidak lagi dilaksanakan ditahun 2016, karena pihak Baznas masih

memiliki tanggungan biaya margin, asuransi, dan administrasi untuk realisasi PUSYAR tahun 2014 dan 2015.

b. *Input*

Dilihat dari indikator *input*, sumber daya dalam program PUSYAR yang terdiri sumber daya manusia dan sumber daya finansial telah cukup dalam mencapai keberhasilan PUSYAR. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan PUSYAR adalah kerjasama empat instansi yang disebut empat pilar, yaitu Baznas Kota Mojokerto, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Diskoperindag Kota Mojokerto, serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang telah diatur dalam MoU kerjasama PUSYAR. Sedangkan sumber daya finansial dalam program PUSYAR diperoleh dari dana APBD Kota Mojokerto yang merupakan bagian dari penyertaan modal PT. BPRS kota Mojokerto dari APBD. Kemudian biaya margin, asuransi dan administrasi yang ditanggung oleh Baznas diperoleh dari pengelolaan dana infaq dan sedekah Kota Mojokerto.

Keberhasilan program PUSYAR juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan secara tepat yaitu melalui sosialisasi secara berkala melalui kelurahan dan media cetak Mojokerto yaitu Majalah Palapa serta radio lokal. Selain itu, peran Bapak Walikota pun juga besar dalam pelaksanaan PUSYAR. Beliau selalu menyisipkan program PUSYAR disela-sela pidatonya, serta di pengajian rutin di rumah beliau. Terkait dengan mekanisme atau proses dalam program PUSYAR sudah cukup lancar dan mudah, hanya saja mekanisme atau proses PUSYAR memiliki waktu yang cukup lama. Hal ini karena mekanisme PUSYAR melibatkan tiga instansi yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing masing, sehingga membutuhkan waktu tersendiri disetap instansi. Selain itu, kelengkapan persyaratan dari masing-masing calon peserta pun juga dapat berpengaruh dalam lamanya proses mekanisme pengajuan PUSYAR.

c. *Process*

Dilihat dari indikator *process*, tidak ada kendala ataupun kesulitan yang cukup berarti dalam pelaksanaan program PUSYAR, baik dari pihak pelaksana maupun dari pihak peserta dan calon peserta. Para pelaksana berharap dana yang digulirkan dapat terus bertambah disetiap

tahunnya, sehingga dapat lebih banyak membantu permodalan dari UKM dan IKM di Kota Mojokerto. Semua pelaksana program PUSYAR telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan MoU yang telah disepakati, namun sayangnya dalam hal ini pihak MES kurang bekerja secara efektif. Dimana masih banyak peserta PUSYAR yang justru tidak tahu menahu mengenai tugas atau tanggungjawab dari MES. Hal ini disebabkan karena kendala finansial dari pihak MES, yang menyebabkan mereka kurang bekerja secara maksimal.

d. *Product*

Dilihat dari indikator *product*, program PUSYAR yang telah mencapai tujuan dan kelompok sasaran mampu membawa dampak dan manfaat bagi UMKM selaku peserta PUSYAR. Manfaat yang dirasakan masyarakat khususnya pemilik UKM dan IKM dalam pelaksanaan program PUSYAR ini adalah adanya bantuan pinjaman tanpa disertai bunga. Selain itu, manfaat lain adalah kemudahan mencari pinjaman sebagai tambahan modal bagi usaha UKM dan IKM di Kota Mojokerto. Dampak yang ditimbulkan program PUSYAR adalah dampak positif yaitu berkembangnya usaha yang dimiliki peserta PUSYAR melalui bertambahnya produksi atau usaha yang dimiliki.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi program PUSYAR di Kota Mojokerto melalui model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam. Pertama context evaluation, program PUSYAR telah mencapai tujuan dan kelompok sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun ada kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu keterbatasan dana dari Baznas Kota Mojokerto sebagai biaya margin, asuransi, dan administrasi. Kedua, input evaluation, semua indikator telah terpenuhi serta mampu mendukung keberhasilan PUSYAR termasuk alternatif dan strategi yang diterapkan. Namun mekanisme pengajuan pinjaman membutuhkan waktu yang lama. Salah satunya disebabkan tidak adanya standar waktu yang ditetapkan. Ketiga adalah process evaluation, dapat diketahui bahwa dari keempat pihak pelaksana dalam program PUSYAR, pihak MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) kurang maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Keempat adalah product evaluation, program PUSYAR ini telah mampu membawa manfaat

dan dampak positif bagi kelompok sasaran yaitu memberikan pinjaman pembiayaan tanpa bunga dan biaya tambahan serta mengembangkan usaha yang dimiliki UKM dan IKM selaku peserta PUSYAR baik menambah produksi maupun menambah usaha baru.

### Saran

Setelah mengetahui hasil Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto maka penulis memberikan saran untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan PUSYAR sebagai berikut :

1. Berupaya mempersingkat waktu dalam mekanisme pinjaman melalui penetapan standart minimal dan maksimal waktu pelayanan (SOP) terkait hal tersebut.
2. Meningkatkan peran MES sebagai pihak yang berwenang dalam membina dan mengawasi peserta PUSYAR, sehingga mampu membawa kemajuan bagi usaha yang dimiliki. Serta mendukung dan membantu pelaksanaan penerima bantuan (peserta PUSYAR), agar dapat lebih membawa dampak dan manfaat secara optimal.
3. Program PUSYAR ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan memunculkan inovasi-inovasi lain mengenai pengembangan program PUSYAR.

### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta Bandung.

Afifudin & Saebani, B.A. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Aneka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

<http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158>  
(Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016).

[www.jpip.or.id/artikelview-354.html](http://www.jpip.or.id/artikelview-354.html) (Diakses pada tanggal 2 September 2016)

<http://mojokerto.bps.go.id> (Diakses Pada Tanggal 6 September 2016)

I.G. Alit Semara P. dan I.A. Nyoman Saskara. 2013. *Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan*

*Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar*. Universitas Udayanan. (online) (diakses pada tanggal 1 September 2016)

Alfi, Hurriyatul. 2014. *Efektivitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. (online) (diakses pada tanggal 2 September 2016)

Anton, Mizar, Mardiyono et all. \_ *Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (studi kasus pada PPP Tamperan Kab.Pacitan)*. Universitas Brawijaya. (Online) (Diakses Pada Tanggal 1 September 2016)

Indrasari, Feny. 2016. *Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto*. Universitas Negeri Surabaya. (<http://ejournal.unesa.ac.id>) (Diakses Pada Tanggal 16 September 2016)

Muhammd Nafik H. R. 2009. *Ekonomi ZISWAQ*. Surabaya: Islamic Finance Development Institute (IFDI).

Puspitasari, Niken. 2016. *Evaluasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (studi pada budidaya ikan kerapu)*. Universitas Negeri Surabaya (<http://ejournal.unesa.ac.id>) (Diakses Pada Tanggal 19 September 2016)

Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Stufflebeam, D.L. 2003. *The CIPP Model for Evaluation*. The Article presented at the 2003 annual conference of the Oregon Program Evaluator Network (OPEN) 3 Oktober 2013.

Subarsono, Agus. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Sudantoko, Djoko dan Hamdani, Muliawan. 2009. *Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. PP. Mardiy Mulya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Pembangunannya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita